

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film merupakan salah satu media komunikasi massa yang efektif dalam menjalankan fungsi *transmission of values* atau penyebaran nilai kepada khalayak umum karena film memiliki daya tarik dengan kemasan audio visualnya yang menarik dan kemudahan akses yang diberikan melalui platform offline maupun online yang bisa diakses di mana saja. Selain itu, film juga memiliki unsur kedekatan dengan khalayak luas karena seringkali film menampilkan isu atau permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar, bagaimana kelompok yang berbeda dipersepsikan dan dipahami oleh masyarakat umum secara positif atau negatif berdasarkan latar belakang budaya yang ada. Salah satu isu atau permasalahan yang seringkali ditayangkan dalam media massa film yaitu mengenai diskriminasi gender terhadap perempuan.

Film yang membahas mengenai perempuan seringkali menggambarkan perempuan dengan stereotip yang lemah, tidak rasional, perempuan yang suka menggoda, sedangkan laki-laki digambarkan dengan stereotip sosok yang kuat, rasional, dan dominan (Dayanti, 2011). Penggambaran perempuan sebagai sosok yang lemah dalam film tersebut tidak terlepas dari konstruksi gender di tengah masyarakat dengan budaya patriarki.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral di mana posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Israpil,

2017) . Perempuan dalam budaya patriarki ditempatkan sebagai manusia kelas dua yang termarginalkan dan dinilai lebih rendah daripada laki-laki, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan utama yang mendominasi berbagai peran dalam masyarakat. Budaya patriarki juga membatasi ruang gerak perempuan di mana perempuan dianggap hanya dapat bergerak di dalam ranah domestik mengurus rumah tangga, sedangkan ranah publik merupakan ruang atau wilayah laki-laki yang berisikan permasalahan kekuasaan di mana perempuan dianggap tidak kompatibel dalam permasalahan tersebut. Perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin, pelindung, pencari nafkah, dan melaksanakan tugas besar di sektor publik, serta tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan negara (Gita Murniasih et al., 2018).

Tidak dapat dipungkiri, perempuan juga digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan dalam menjalankan kekuasaan melalui media film. Salah satunya yaitu film *Kartini* (2017) yang menceritakan tentang tokoh nasional Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan agar perempuan dapat secara setara mendapatkan hak yang sama di tengah budaya Jawa yang kental akan budaya patriarki. Kartini digambarkan sebagai sosok yang berani melawan dan mengutarakan pendapatnya, serta gigih memperjuangkan kebebasan bagi perempuan. Dengan kekuasaan dan keberanian yang dimilikinya, Kartini dapat menentang ketidakadilan pada perempuan dan mewujudkan keinginannya untuk membebaskan perempuan dari budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Selain film *Kartini* (2017), salah satu film yang membahas tentang kekuasaan perempuan dalam ranah publik yaitu Film *Tilik the Series* (2023).

Film *Tilik the Series* (2023) merupakan salah satu film yang membahas mengenai bagaimana perempuan berpartisipasi dalam salah satu ranah publik, yaitu ranah politik yang terkenal akan “ranah laki-laki” dan memiliki kesenjangan gender yang lebar. Berdasarkan pada hasil data World Economic Forum (WEF) mengenai Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2024, bidang politik menjadi bidang di Indonesia yang memiliki skor indeks ketimpangan gender yang lebar dengan skor 0,138 yang jauh dari skor kesetaraan gender pada rentang 1 ke atas dan berada pada peringkat 107 dari 146 negara.



Gambar 1.1 Hasil data WEF Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia

Indeks ketimpangan gender Negara Republik Indonesia yang menempati peringkat rendah dalam bidang politik ini membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu memberikan ruang aman dan hak yang sama bagi perempuan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan politik. Padahal dalam hukum nasional dan internasional konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1970 dan diratifikasi pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, perempuan memiliki berbagai hak untuk

berpartisipasi dalam politik, yaitu hak untuk memperoleh jaminan memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, hak untuk memiliki posisi atau jabatan dalam pemerintahan, hak untuk berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan, serta memiliki jaminan untuk melakukan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat dan politik.

Dengan memperlihatkan kekuasaan dan kemampuan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan politik, Film *Tilik the Series* tayang dalam platform WeTv dengan mengembangkan cerita dari film pendek Tilik yang pernah *viral* pada tahun 2018. Ravacana Films selaku rumah produksi film pendek Tilik bekerjasama dengan MD Entertainment menghadirkan kembali film pendek Tilik dengan genre *comedy-drama* dan format serial yang terdiri dari delapan episode dengan durasi rata-rata 30 hingga 40 menit di setiap episodenya.

Film yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo ini merepresentasikan realitas sosial mengenai bagaimana kondisi dan permasalahan yang harus dihadapi perempuan untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam kontestasi politik. Bu Tejo atau Bu Asriningtyas yang diperankan oleh Siti Fauziah dalam film ini diceritakan hendak mencalonkan lurah di mana ia harus berhadapan dengan lawan politiknya Suhartono yang diperankan oleh Seteng Sutardja. Berbagai permasalahan internal dan eksternal harus dihadapi oleh Bu Tejo untuk memenangkan kontestasi politik ini. Dari permasalahan peran ganda sebagai ibu dan calon kepala daerah hingga Bu Tejo harus dihadapkan dengan ideologi maskulinitas politik.

Maskulinitas dan politik dianggap saling berkaitan sebagai domain yang dapat menggerakkan roda politik internasional dan hanya dimiliki oleh laki-laki. Sifat kekerasan, keberanian, kekuasaan, kemandirian, dan kekuatan fisik sudah sangat lama mempengaruhi politik internasional dalam tatanan politik global yang diproyeksikan dalam tingkah laku atau kebijakan dalam pembuatan keputusan atau *decision making process* yang cenderung merefleksikan maskulinitas dengan instrumen kekerasan (Muryantini et al., 2020). Praktik ideologi maskulinitas politik ini mengakibatkan adanya pandangan bahwa perempuan tidak layak dan memiliki kemampuan dalam menjalankan bidang politik.

Praktik kekuasaan maskulinitas politik oleh laki-laki diperlihatkan oleh tokoh Suhartono yang memiliki ambisi untuk menjadi lurah. Suhartono menganggap bahwa laki-laki memiliki nilai lebih daripada perempuan dan memiliki kekuasaan atas perempuan. Sosok perempuan dianggap sebagai individu yang sulit melaksanakan tugas kepemimpinan karena perempuan merupakan sosok yang lemah.

Meskipun film *Tilik the Series* masih menggambarkan figur perempuan sebagai figur yang suka bergosip dan cerewet, namun film ini juga menunjukkan kekuasaan perempuan yang perhatian, telaten, dan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Dibandingkan berfokus untuk menjatuhkan lawan, pemimpin perempuan dalam film ini digambarkan lebih fokus dalam mengkomunikasikan agenda politiknya kepada warga dan membuat kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada laki-laki.

Perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan (*women power*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki terletak pada konsep feminin yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan memiliki rasa kasih sayang dan tanggap terhadap kebutuhan orang lain sebagai agenda politiknya, sedangkan laki-laki seringkali menggunakan intrik politik yang berpusat pada dirinya sendiri. Selain itu, kekuasaan pada perempuan memperhatikan konsep pemberdayaan yang sebelumnya dimaknai sebagai sarana menginjak orang lain untuk memperoleh kekuasaan.

Intuisi dan empati yang dimiliki oleh perempuan juga menjadi salah satu kekuatan perempuan yang mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik karena berdasarkan Eagly & Carli (2003), perempuan lebih *interpersonally oriented* yang didukung oleh pernyataan Agustiana (2021) bahwa perempuan memiliki kecerdasan emosional untuk membangun relasi dengan pihak yang dipimpinnya. Selain itu, perempuan dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang adil dan dapat menyuarakan isu gender dengan mempertimbangkan sudut pandang perempuan.

Ketertarikan peneliti dalam perjuangan Bu Tejo dan para tokoh perempuan yang ikut serta dalam kontestasi politik dengan adanya praktik kekuasaan dan ideologi maskulinitas politik membuat peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul, “Representasi Perempuan Berpolitik dalam Film *Tilik the Series*” untuk mengetahui bagaimana posisi Film *Tilik the Series* merepresentasikan perempuan berpolitik.

1.2 Rumusan Masalah

Perempuan dalam media komunikasi massa film tidak lagi hanya digambarkan sebagai sosok yang lemah, perempuan juga dapat ikut berperan aktif dalam ranah publik dan memiliki kekuasaan di bidang politik. Film *Tilik the Series* menggambarkan realitas bagaimana hambatan yang harus dihadapi perempuan di Indonesia untuk ikut serta dalam bidang politik yang dianggap sebagai ranah laki-laki. Adapun salah satu penyebab rendahnya partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam dunia politik yaitu maskulinitas politik yang dibangun dengan memberikan stereotip atau pandangan bahwa politik merupakan ranah laki-laki yang tidak sesuai dengan citra feminin perempuan sehingga membuat perempuan kesulitan untuk melakukan aktivitas politik. Padahal dengan citra feminin, perempuan menurut pernyataan Agustiana (2021) memiliki kecerdasan emosional untuk membangun relasi dengan pihak yang dipimpinnya sehingga seharusnya perempuan dapat mewujudkan kepemimpinan yang adil dan setara. Rumusan masalah dari skripsi dengan judul, “Representasi Perempuan Berpolitik dalam Film *Tilik the Series*,” yaitu:

- a. Apakah film *Tilik the Series* merepresentasikan perempuan berpolitik pada media film dalam bentuk kekuasaan perempuan atau masih terdapat penerapan praktik ideologi maskulinitas politik yang mendominasi?
- b. Bagaimana Film *Tilik the Series* membedakan perempuan berpolitik dari laki-laki?
- c. Bagaimana posisi Film *Tilik the Series* dalam merepresentasikan perempuan berpolitik?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami pemaknaan perempuan berpolitik melalui simbol dan tanda yang direpresentasikan dan diposisikan pada Film *Tilik the Series* dengan bentuk kekuasaan perempuan atau masih terdapat praktik ideologi maskulinitas politik.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman, serta memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Komunikasi, terutama mengenai fungsi film sebagai bentuk produk media massa untuk mentransmisikan pesan kepada audiens, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai konstruksi gender dalam bidang politik melalui film.

1.4.2 Signifikansi Sosial

Penelitian ini secara sosial diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpikir secara kritis dalam mengkonsumsi media yang membahas mengenai kekuasaan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan adanya praktik ideologi maskulinitas politik di tengah masyarakat dengan budaya patriarki sehingga masyarakat dapat mengetahui permasalahan dan upaya perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik.

1.4.3 Signifikansi Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat pada:

- a. Akademisi dengan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana perempuan dalam berpolitik, teori representasi, dan kajian analisis semiotika yang diterapkan pada media film.
- b. Pemangku kebijakan dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang harus dihadapi oleh perempuan dalam bidang politik sehingga pemangku kebijakan dapat memperhatikan dan mengembangkan kebijakan untuk memberikan kesetaraan bagi perempuan dalam bidang politik.
- c. Peneliti selanjutnya dengan memberikan referensi, pengetahuan, serta pemahaman mengenai kekuasaan perempuan dan maskulinitas dalam bidang politik, kajian film dengan menggunakan teori representasi, serta analisis kajian semiotika John Fiske.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian Representasi Perempuan Berpolitik dalam Film *Tilik the Series* ini menggunakan paradigma kritis. Paradigma penelitian berguna bagi peneliti untuk menentukan metode dan teknik penelitian sehingga peneliti dapat mengumpulkan dan memperoleh data sesuai dengan realitas atau fakta mengenai topik yang diteliti. Untuk menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam melakukan analisis pada skripsi dengan judul “Representasi Perempuan Berpolitik dalam Film *Tilik the Series*,” menggunakan paradigma atau perspektif komunikasi kritis dengan memberikan interpretasi mengenai representasi

perempuan berpolitik dalam film *Tilik the Series*, mengubah realitas sosial di mana perempuan juga memiliki kapabilitas untuk melanggengkan kekuasaan di tengah maskulinitas politik.

1.5.2 State of Art

Pada penelitian pertama dengan judul Analisis Semiotika Subordinasi Perempuan dalam Web Series “*Tilik the Series*” yang dipublikasikan pada tahun 2024 karya Regalia Lintas Pulau Welerubun & Faikar Urfan dari Universitas Teknologi Yogyakarta membahas mengenai bagaimana film *Tilik the Series* merepresentasikan adanya subordinasi perempuan ketika hendak menjadi seorang pemimpin. Perempuan dianggap sebagai gender kedua yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dan hanya dapat berkutat di dalam urusan rumah tangga. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik analisis semiotika Ferdinand de Saussure, peneliti tersebut menjelaskan mengenai adanya subordinasi perempuan dalam film *Tilik the Series* dengan menggunakan penanda (signifier) yang berupa dialog, adegan, bahasa tubuh, dan ekspresi, sedangkan petanda (signified) berupa penjelasan mengenai adegan yang ada di dalam film *Tilik the Series*. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk subordinasi perempuan yang terangkum dalam delapan adegan pada Film *Tilik the Series* yaitu keharusan perempuan untuk tunduk kepada laki-laki, pelekatan identitas laki-laki kepada perempuan yang sudah menikah di mana perempuan disebut dengan nama panggilan suaminya, perempuan dianggap lemah untuk menjadi seorang pemimpin, serta *title* janda yang melekat pada perempuan yang gagal dalam pernikahannya dianggap sebagai aib.

Pada penelitian kedua dengan judul *Women's Domination in Their Relationship with Language in the Movie "Tilik the Series"* karya Kunti Zahrotun Alfi, Kastam Syamsi, Anwar Efendi, Hartono yang dipublikasikan tahun 2023 dalam Jurnal English as a foreign language (EFL) dan Linguistik Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta mendeskripsikan bagaimana dominasi perempuan dalam film *Tilik the Series* melalui dialog dan adegan menggunakan teknik analisis wacana kritis Sara Mills. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa dalam delapan episode, terdapat sembilan dialog yang menggambarkan adanya dominasi perempuan sebagai subjek yang kuat dalam masyarakat yang diperlihatkan melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh para tokoh dalam film *Tilik the Series*. Perempuan digambarkan memiliki kemampuan untuk menyuarakan pendapat, melawan ketidakadilan, dan berbahasa dengan baik untuk melindungi diri dan hak mereka. Meskipun begitu, juga terdapat situasi di mana perempuan diposisikan sebagai objek dalam konteks rumah tangga yang harus tunduk pada laki-laki. Terdapat transformasi signifikan mengenai peran dan persepsi perempuan dalam masyarakat yang tergambarkan melalui film ini tanpa mengesampingkan unsur budaya.

Pada penelitian ketiga dengan judul *Feminisme dalam Film Pendek "Tilik"* (Analisis Semiotika) yang dipublikasikan tahun 2021 karya Ela Indah Dwi Syayekti dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo membahas mengenai adanya ideologi feminisme dan patriarki yang ada di dalam film pendek *Tilik* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan semiotika John Fiske. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya feminisme dalam level realitas yang ditunjukkan

melalui gaya berpakaian dan bahasa tubuh tokoh perempuan dalam film pendek Tilik yang menunjukkan adanya kesederhanaan. Kemudian, pada level representasi yang digambarkan melalui dialog dan adegan menunjukkan bahwa perempuan dalam film tersebut memiliki sikap yang baik, peduli, dan partisipatif. Selanjutnya, pada level ideologi menunjukkan bahwa perempuan dalam film pendek Tilik memiliki sikap kepemimpinan yang disukai oleh masyarakat.

Penelitian keempat dengan judul Representasi Feminisme Liberal Pada Tokoh Gangubai Dalam Film “Gangubai Kathiawadi” (Analisis Semiotika John Fiske) yang dipublikasikan tahun (2023) karya Ulul Azmi, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta membahas mengenai bagaimana feminisme liberal direpresentasikan pada tokoh Gangubai pada film Gangubai Kathiawadi. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan semiotika John Fiske, penelitian ini mengkaji persoalan tanda yang menitikberatkan analisis teks sebagai kanal komunikasi. Film Gangubai Kathiawadi dapat merepresentasikan adanya feminisme liberal dalam film tersebut. Level realitas diperlihatkan melalui bagaimana tokoh Ganga melakukan tuntutan dan memperjuangkan hak perempuan pekerja seks yang dipandang rendah dan didiskriminasi oleh masyarakat. Pada level representasi diperlihatkan melalui tokoh Ganga dan perempuan pekerja seks lainnya yang berjuang mendapatkan hak pendidikan. Kemudian, pada level ideologi diperlihatkan melalui tokoh Ganga yang secara fisik, intelektual, dan mentalitas mampu menjadi pemimpin para perempuan pekerja seks dalam menuntut hak-hak mereka.

Penelitian kelima dengan judul Representasi Postfeminime dalam Film: Intelektualitas, Kepemimpinan dan Kedudukan *Princess* “Mulan” yang terbit pada tahun 2021 karya Natasya Candraditya Subardja dan Heidy Arviani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur bertujuan untuk melihat representasi post-feminisme dalam film Disney Princess “Mulan” dengan memperhatikan aspek intelektualitas, pengambilan keputusan oleh perempuan, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika John Fiske dengan hasil bahwa intelektualitas dapat dimiliki seseorang berdasarkan bagaimana cara seseorang berpikir, setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan, serta laki-laki dan perempuan memiliki posisi atau kedudukan yang sama.

Keseluruhan penelitian di atas membahas mengenai bagaimana film dapat merepresentasikan isu diskriminasi yang dialami oleh perempuan dengan memperlihatkan bahwa perempuan berdasarkan budaya yang ada di dalam suatu masyarakat seringkali dianggap sebagai subordinasi yang memiliki sisi feminin yang lemah dan lembut sehingga dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang dianggap berada pada ranah maskulinitas. Meskipun begitu, penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan di mana perempuan juga memiliki karakter yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin dengan sikap feminin maupun maskulinitas yang dimilikinya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi terhadap penelitian dengan judul Representasi Perempuan Berpolitik pada Film *Tilik the Series* ini

karena selain membahas mengenai diskriminasi yang dialami oleh perempuan, serta kekuatan dari sisi feminin dan maskulinitas yang dimiliki perempuan dalam kegiatan kepemimpinan, film ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika John Fiske untuk mengetahui bagaimana kekuasaan perempuan di dalam bidang politik direpresentasikan dalam film *Tilik the Series* dan bagaimana ideologi maskulinitas menghambat terpenuhinya hak-hak yang dimiliki perempuan dalam berpolitik.

1.5.3 Representasi

Representasi berasal dari bahasa inggris representation yang memiliki arti penggambaran. Menurut Stuart Hall (2013), representasi merupakan bahasa untuk menyampaikan pesan yang berarti atau memberikan penggambaran mengenai dunia kepada orang lain dan memiliki keterkaitan dengan penggunaan bahasa, tanda, atau gambar. Dalam hal ini, representasi memberikan suatu pesan atau pandangan yang hendak disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa.

Stuart Hall membagi representasi ke dalam dua proses yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental merupakan konsep dimana indera manusia menangkap segala sesuatu yang bersifat abstrak dan menyimpannya ke dalam kepala atau pemikiran, sedangkan representasi bahasa merupakan konsep dimana bahasa berperan dalam proses konstruksi makna sehingga apa yang ada di dalam kepala atau pemikiran dapat diterjemahkan melalui bahasa supaya kita dapat menghubungkan konsep atau ide mengenai sesuatu dengan tanda dari simbol tertentu.

Stuart Hall mengatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam proses representasi, yaitu pendekatan reflektif, pendekatan intensional, dan pendekatan konstruksionis.

- Pendekatan Reflektif (*reflective*) merupakan pendekatan yang memiliki efek serupa dengan cermin yaitu menggambarkan makna yang sebenarnya terjadi di kehidupan dimana makna diproduksi oleh manusia melalui ide, objek, dan pengalaman nyata.
- Pendekatan Intensional merupakan pendekatan dimana bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan memperhatikan pemaknaan berdasarkan sudut pandang pribadi seseorang.
- Pendekatan Konstruksionis merupakan pendekatan dengan menekankan proses konstruksi atau pembangunan makna dengan menghadapi bahasa dengan hal lain sehingga tercipta interpretasi atau pemaknaan. Dalam tahap ini, manusia dapat melakukan seleksi dan menetapkan makna yang ada di dalam pesan atau karya yang ada.

Penggambaran realitas sosial melalui representasi tercipta dari pemikiran manusia yang kreatif dengan kekuatan konstruksi sosial di sekelilingnya. Realitas sosial menurut Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 2007), yaitu sebuah proses dialektika yang berlangsung dalam proses simultan yang terdiri dari:

- Eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan sosiokultural yang merupakan bagian dari hasil produk manusia.
- Objektivasi merupakan interaksi sosial yang terjadi intersubjektif atau persetujuan realitas objek di masyarakat yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi;

- Internalisasi merupakan proses identifikasi individu sebagai anggota dalam lembaga sosial atau organisasi sosial di lingkungan sekitarnya.

1.5.4 Standpoint Theory

Teori sudut pandang atau *standpoint theory* berawal dari tahun 1807 ketika filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel mendiskusikan adanya perbedaan sudut pandang mengenai hubungan tuan tanah dan budak yang memperlihatkan bahwa meskipun keduanya hidup dalam lingkungan yang sama, namun memiliki pengetahuan yang berbeda (Jayanti, 2011). Pandangan tersebut kemudian dibenarkan oleh Karl Marx karena posisi dari pekerja membentuk bagaimana mereka berpikir dan tingkat intelektualitas mereka yang berhubungan dengan kesempatan atau *privilege* yang didapatkan.

Nancy Hartsock kemudian mengembangkan teori sudut pandang tersebut pada tahun 1983 dengan mempublikasikan “The Feminist Standpoint : Developing the Ground for a Specially Feminist Historical Materialism” yang berisikan upaya Hartsock menghadirkan perempuan dalam teori Marx dengan mengaitkan semua aktivitas manusia. Pengetahuan, pengalaman, dan perilaku komunikasi manusia, baik perempuan dan laki-laki terbentuk berdasarkan tempat mereka berasal sehingga teori sudut pandang ini melakukan advokasi kritis mengenai *status quo* karena struktur kekuasaan yang melakukan dominasi (West & Turner, 2010).

Hartsock (2019) memberikan lima asumsi mengenai asal dari kehidupan sosial yaitu:

1. Struktur kehidupan material yang menetapkan batasan pada pemahaman tentang hubungan sosial.

2. Kehidupan material dengan dua kelompok yang bertolak belakang menimbulkan pemahaman yang juga bertolak belakang dan dapat merugikan pihak yang berada pada posisi subordinat.
3. Pandangan kelompok yang memiliki kuasa dapat memaksa semua kelompok untuk berpartisipasi dan menghilangkan pilihan dari subordinat.
4. Diperlukan upaya yang keras untuk menyuarakan pandangan kelompok yang tertindas atau subordinat dalam kehidupan sosial.
5. Kelompok subordinat memerlukan upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih maju dan adil di tengah kelompok yang superior.

Dalam mengembangkan teori Marx, Hartsock (2019: 295) mengemukakan bahwa kelompok tertindas perlu terlibat dalam proses historis, politis, dan teoritis untuk membentuk pemahaman baru mengenai kehidupan sosial, diperlukan juga keyakinan dan pemahaman mengenai suatu pengetahuan, pengakuan bahwa aktivitas praktis sehari-hari mengandung pengetahuan, dan diperlukan kemampuan untuk mengenali dan menciptakan alternatif baru dalam menghadapi kesulitan karena kelas penguasa, ras, dan gender mengkonstruksikan dunia dengan hubungan material-sosial yang memaksa semua pihak berpartisipasi sehingga kelompok yang tertindas memerlukan pemahaman untuk mengungkap hal-hal yang tidak manusiawi.

1.5.5 Feminist Film Theory

Feminist film theory atau teori film feminis muncul pada awal tahun 1970-an untuk memahami sinema sebagai praktik budaya yang merepresentasikan dan mereproduksi mengenai perempuan dan feminitas (Smelik, 2019). Representasi

dalam film bukan berarti hanya merekam realitas, namun juga mengkonstruksikan gambaran mengenai realitas menggunakan kode, mitos, konvensi, atau tanda (Murray, 2019:14).

Representasi perempuan dalam film sendiri cenderung membentuk realitas perempuan secara bias dan konservatif karena film sebagai produk media berasal dari suatu budaya dan mencerminkan norma atau nilai dalam suatu budaya. Para pembuat film juga tidak dapat terhindar dari hubungan karya mereka dengan budaya sosial, politik, dan sejarah di mana mereka berada. Karya yang sudah ada mempengaruhi perkembangan karya baru melalui peniruan dan pengulangan unsur tertentu (Murray, 2019).

Kondisi sosial masyarakat yang masih melekat dengan budaya patriarki dan industri film yang didominasi laki-laki membuat peran perempuan dalam film seringkali hanya berkutat pada tampilan fisik dan bergantung dengan karakter laki-laki. Sementara itu, meskipun perempuan menjadi peran utama, perempuan seringkali diperlihatkan sebagai sosok yang kebingungan, membutuhkan bantuan, pasif, dan sebagai makhluk seksual (Smith, 2022).

Kehadiran kreator film perempuan meningkatkan kemungkinan akan meningkatnya kesetaraan gender dalam representasi film seperti yang dikatakan oleh pakar media feminis di mana diperlukan keterlibatan perempuan sebagai kreator, aktor, dan penonton perempuan untuk melihat perbedaan representasi perempuan yang ada saat ini (Neroni, 2016:65).

1.5.6 *Feminisme Liberal dan Kekuasaan Perempuan dalam Politik*

Feminisme secara etimologis berasal dari kata *Femme* (woman) dan *isme* atau kepercayaan yang diartikan sebagai kepercayaan dalam memperjuangkan hak kaum perempuan. Feminisme terbentuk karena adanya kesadaran akan ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh perempuan, serta adanya keinginan perempuan untuk melawan penindasan tersebut. Definisi feminisme dapat berubah-ubah karena perbedaan pemahaman oleh para feminis yang disebabkan oleh perbedaan realitas secara historis, budaya, dan tingkat kesadaran persepsi dan perilaku di dalam lingkungannya.

Feminisme liberal menjadi salah satu aliran feminisme yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan hak perempuan yang berkembang dari abad ke-18 dan 19. John Stuart Mill dan Harriet Taylor mengklaim bahwa cara untuk memaksimalkan utilitas agregat atau kebahagiaan adalah memberikan izin kepada individu untuk mengejar keinginan mereka dan apabila masyarakat ingin mencapai kesetaraan atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan peluang ekonomi yang sama dengan apa yang dinikmati oleh laki-laki (Tong, 2018:16).

Pemenuhan hak politik perempuan dan keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik mendorong hasil kebijakan yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan potensi perempuan untuk mengurus dan mengelola kebutuhan hidup, seperti kesehatan reproduksi, kepedulian dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari kekerasan yang seringkali menimpa perempuan. Perempuan yang identik dengan kepekaan dan urusan domestik rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memiliki kesadaran, merasakan, dan

memiliki pengalaman dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi di lingkungan masyarakat, seperti pentingnya pendidikan bagi anak, pemenuhan gizi, dan kenaikan harga bahan pangan.

Tidak hanya mewakili dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan perempuan saja, perempuan yang terlibat aktif secara umum dalam kegiatan politik juga berperan dalam mengatasi permasalahan sosial dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Vicky Randall (dalam Pudji, 2008) mengindikasikan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah. Perempuan dengan mengusung isu-isu politik yang *conventional*, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial membuat kehidupan berpolitik lebih bermoral dibandingkan dengan *hard politics* yang mengusung anggaran pembelian senjata, perang, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik ini membawa perempuan dalam predikat *agent of change* atau pembawa perubahan yang memiliki potensi besar membawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik.

Segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk merasakan kesetaraan gender dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang politik tentunya tidak hanya memerlukan kesadaran pada perempuan saja, namun juga memerlukan dukungan dari segala pihak sehingga kebijakan yang ada dalam dunia politik tidak lagi hanya berdasarkan pandangan dan kepentingan laki-laki saja, namun juga mewakili pandangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

1.5.7 Partisipasi Politik oleh Perempuan

Partisipasi merupakan penggabungan bahasa latin yang berasal dari kata pars yang artinya bagian dan cepere yang artinya mengambil. Dalam hal ini, partisipasi dianggap sebagai kegiatan untuk mengambil atau terlibat, serta kepemilikan andil dalam suatu hal untuk memberikan pengaruh. Partisipasi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang politik.

Semua warga negara dapat berpartisipasi dalam bidang politik tanpa memandang ras, agama, suku, antar golongan, maupun gender. Dalam hal ini, perempuan juga dapat berpartisipasi secara aktif terlibat dalam kegiatan berpolitik. Namun, menurut Lycette (dalam Parwati & Istiningdiah, 2021) terdapat empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi dan terlibat pada kegiatan politik, antara lain:

- Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;
- Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;
- Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
- Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan maupun program keluarga berencana.

Adapun berbagai kendala dan hambatan yang harus dialami perempuan yang terlibat dan berpartisipasi dalam politik sudah seharusnya dihilangkan karena sekarang ini banyak perempuan berprestasi yang terjun ke dalam ranah politik, antara lain:

- Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Republik Indonesia ini memiliki beragam prestasi yang diakui di dunia internasional. Salah satu kebijakannya yang mendorong peran perempuan dalam bidang ekonomi yaitu digitalisasi ekonomi dimana meskipun perempuan sibuk dengan urusan domestik, kebijakan ini memberikan keluwesan bagi perempuan untuk dapat berbisnis secara digital dengan konsep *work from home*.
- Tri Rismaharini sebagai menteri sosial Republik Indonesia ini menjadi perempuan pertama yang berhasil menjabat sebagai walikota. Sosoknya yang tegas ini membawa Kota Surabaya meraih piala Adipura Kencana delapan kali secara berturut-turut dari 2011 hingga 2018 untuk kategori kota metropolitan.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan secara aktif dalam bidang politik di Indonesia yang menuai banyak prestasi ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang politik. Bahkan, sejak orde baru telah dilaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan, seperti:

- Menetapkan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan,
- Menetapkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan,

- Membentuk Kementerian Negara urusan Peranan Wanita sejak orde baru yang masih eksis hingga hari ini dengan nama Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan.
- Mendirikan organisasi sebagai wadah perempuan berpartisipasi seperti PKK, Dharma Wanita, dan lainnya.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik ini menunjukkan bahwa penempatan perempuan dalam suatu posisi hierarki sosial dapat menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap penindasan ketidaksetaraan gender yang seringkali dialami perempuan dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adanya keterlibatan dan keterwakilan perempuan di bidang politik ini mengakibatkan adanya kecenderungan kebijakan yang hanya menempatkan kepentingan laki-laki dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan perempuan secara aktif mendorong hasil kebijakan yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan potensi perempuan untuk mengurus dan mengelola kebutuhan hidup, seperti kesehatan reproduksi, kepedulian dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari kekerasan yang seringkali menimpa perempuan. Perempuan yang identik dengan kepekaan dan urusan domestik rumah tangga ini, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kesadaran, merasakan, dan memiliki pengalaman dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi di lingkungan masyarakat, seperti pentingnya pendidikan bagi anak, pemenuhan gizi, dan kenaikan harga bahan pangan. Tidak hanya mewakili dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan perempuan saja, perempuan yang terlibat aktif secara umum dalam kegiatan politik

juga berperan dalam mengatasi permasalahan sosial dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Perempuan dengan mengusung isu-isu politik yang konvensional, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial membuat kehidupan berpolitik lebih bermoral dibandingkan dengan *hard politics* yang mengusung anggaran pembelian senjata, perang, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik ini membawa perempuan dalam predikat *agent of change* atau pembawa perubahan yang memiliki potensi besar membawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik. Pentingnya peran perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan dukungan dari segala pihak sehingga kebijakan yang ada dalam dunia politik tidak lagi hanya berdasarkan pandangan dan kepentingan laki-laki saja, namun juga mewakili pandangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

1.5.8 Stereotip Perempuan dalam Politik

Stereotip berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *stereos* atau padat-kaku dan *typos* yang artinya model. Samovar & Porter (dalam Lampe & Anriani, 2016) mendefinisikan stereotip sebagai persepsi atau kepercayaan yang dianut oleh kelompok atau individu berdasarkan pada pendapat atau sikap yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, dikutip oleh Warnaen dari bukunya yang berjudul *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis* (2002) dijelaskan bahwa Walter Lippmann mendefinisikan stereotip sebagai gambaran di kepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan yang sebenarnya. Stereotip dianggap sebagai salah satu

mekanisme yang disederhanakan untuk mengendalikan lingkungan yang luas, majemuk, dan bergerak terlalu cepat. Gambaran lingkungan yang terlalu cepat tersebut yang membentuk seseorang bertindak untuk melakukan pengenalan lingkungan berdasarkan gambaran pribadi dan gambaran dari orang lain.

Pengalaman pembentukan stereotip diperoleh melalui berbagai cara, antara lain pengalaman pribadi, pengalaman dari orang lain, dan pengalaman dari media massa.

- a. Pengalaman pribadi diperoleh setelah berinteraksi dengan individu atau kelompok yang berbeda ras, etnik, agama, dan kelompok sosial yang berbeda.
- b. Pengalaman dari orang lain yaitu pengalaman yang diperoleh dan dipelajari dari orang lain, seperti bahas, nilai, sikap, dan keyakinan dari orang lain yang memberikan informasi.
- c. Pengalaman dari media massa yaitu pengalaman yang diperoleh melalui media yang memberikan gambaran mengenai suatu etnik tertentu.

Aspek-aspek stereotip menurut Hewstone & Brown (dalam Supartiningsih, 2012) yaitu kategorisasi, turun temurun, dan karakteristik. Kategorisasi merupakan kondisi dimana keberadaan individu dalam suatu kelompok diidentifikasi dengan pengelompokan kelompok tertentu berdasarkan karakter atau sifat yang dimiliki. Kemudian, turun temurun merupakan sistem pembentuk stereotip yang didasarkan pada sifat dan perilaku individu yang membuat semua anggota menilai bahwa semua kelompok sama dengan individu tersebut. Selanjutnya, karakteristik merupakan sesuatu yang khas atau mencolok dari kebiasaan bertindak suatu kelompok yang digeneralisasi.

Adapun stereotip perempuan berpolitik ini dibagi oleh Dolan ke dalam tiga sudut pandang yang dilihat dari:

- a. Pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan politik dan menjadi pemimpin karena tidak adanya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki perempuan dalam bidang politik.
- b. Pandangan bahwa perempuan memiliki karakteristik feminim mengedepankan perasaan yang tidak rasional dalam mengambil keputusan (*decision making*)
- c. Pandangan bahwa perempuan tidak memiliki pengalaman dalam jabatan publik dan praktik dominasi budaya patriarki yang membuat tidak adanya minat perempuan untuk masuk ke dalam jabatan publik karena adanya pandangan bahwa politik ranah yang kotor dan taktik (Dolan, 2014).

Stereotip maskulinitas yang melemahkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sudah seharusnya tidak lagi menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik karena kekuasaan perempuan (*women power*) mengintegrasikan kekuasaan yang dapat dicapai oleh laki-laki dan perempuan dengan adil. Keluwesan yang dimiliki perempuan dapat menjadikan perempuan politisi yang handal karena partisipasi politik dengan penerapan kekuasaan perempuan diarahkan pada agenda politik tanggap yang memperhatikan kebutuhan orang lain.

1.5.9 Maskulinitas Politik

Maskulinitas politik merupakan bentuk maskulinitas yang dikonstruksikan, dianggap keberadaannya, dan diklaim oleh pemain politik yaitu individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam ranah politik sebagai politisi profesional,

anggota partai, anggota militer, atau warga negara dan anggota gerakan politik yang mengklaim atau memperoleh hak politik (Starck & Luyt, 2019).

Teori maskulinitas sendiri diambil dari salah satu pemikiran Thomas Hobbes dan tokoh lain pada teori realisme yang memiliki pandangan maskulinitas dan sarat akan misoginis. Teori ini mengklarifikasi prajurit laki-laki dan merefleksikannya dalam perilaku negara pada saat itu di mana kita seringkali melihat adanya negara yang menggunakan sifat-sifat maskulinitas yang dinilai ideal untuk menjustifikasi kepentingan nasional dan kebijakan terkait keamanan negara dengan kekerasan yang mengakibatkan munculnya masalah, seperti sosial ekonomi di negara lain terutama negara-negara yang terlibat dalam peperangan dan penyerangan militer seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan.

Maskulinitas politik dalam tingkat kolektif muncul dalam tiga bentuk: (i) meniru dan mengikuti kepemimpinan dengan maskulinitas; (ii) mengikuti budaya dan tradisi komunitas lokal atau organisasi politik secara personal atau interaksional sebagai anggota; (iii) internalisasi atau melawan stereotip media mengenai tindakan sosial gender tertentu (Ozbay & Soybakis, 2020),

Sifat kekerasan, keberanian, kekuasaan, kemandirian, dan kekuatan fisik sudah sangat lama mempengaruhi politik internasional dalam tatanan politik global yang diproyeksikan dalam tingkah laku atau kebijakan dalam pembuatan keputusan atau *decision making process* yang cenderung merefleksikan maskulinitas dengan instrumen kekerasan (Muryantini et al., 2020).

Maskulinitas politik terbagi menjadi beberapa potret, yakni melalui hegemoni militer, superioritas ideologi ras maupun kebudayaan, bentuk perlawanan terhadap

musuh, regulasi yang memproduksi ketidaksetaraan dan melanggengkan maskulinitas, serta kenangan kejayaan di masa lampau. Secara berbeda, Kuba mengartikulasikan maskulinitas melalui prioritas kebijakan yang bersifat feminin seperti sektor kesehatan dan pendidikan (Muryantini et al., 2020).

Pada umumnya laki-laki diberikan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dan perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan emosional dengan karakteristik privat. Dalam dunia internasional, kegiatan ekonomi politik dianggap hanya sebatas menunjukkan sisi maskulinitas yang didominasi laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki kemampuan dalam membentuk atau mempengaruhi politik dan ekonomi internasional (Muryantini et al., 2020).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Modal Kekuasaan

Teori modal dicetuskan oleh Pierre Bourdieu yang berkaitan dengan kekuasaan. Bourdieu memandang modal sebagai basis dominasi yang membentuk aktualisasi kekuasaan dengan situasi, sumber daya, dan strategi pelaku (Halim, dalam Simanjuntak & Djuyandi, 2024). Modal menurut Bourdieu terdiri dari:

- Modal Ekonomi merupakan sumber daya berupa produksi atau finansial yang independen dan fleksibel karena dapat ditransformasikan ke ranah lain dengan mudah atau dapat diwariskan.
- Modal Kultural merupakan kualifikasi intelektual yang didapat dari pendidikan formal maupun informal untuk membangun kemampuan dan keahlian melalui pendidikan yang dilegitimasi.

- Modal sosial merupakan sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan nilai hubungan sosial dan kedudukan sosial dalam masyarakat yang diukur melalui dukungan kelompok kolektif, ikatan pribadi kelompok di luar partai, pengakuan nama untuk menunjukkan ketenaran.
- Model Simbolik merupakan sumber daya dengan elemen jabatan, status, dan latar belakang keluarga yang dibangun melalui dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*).

1.6.2 Gaya Perempuan Berpolitik

Sandra Bem (dalam Ferrer-Pérez & Bosch-Fiol, 2014) membagi gaya kepemimpinan menjadi tiga berdasarkan sifat yang dimiliki individu yaitu maskulin, feminin dan netral dalam Bem Sex Role Inventory (BSRI).

Tabel 1.1 Bem Sex Role Inventory (BSRI)

Maculine	Feminine	Neutral
Acts as a leader	Affectionate	Adaptable
Aggressive	Cheerful	Conceited
Ambitious	Childlike	Conscientious
Analytical	Compassionate	Conventional
Assertive	Does not use harsh language	Friendly
Athletic	Eager to soothe hurt feelings	Happy
Competitive	Feminine	Helpful
Defends own beliefs	Flatterable	Inefficient
Dominant	Gentle	Jealous
Forceful	Gullible	Likable

Has leadership abilities	Loves children	Moody
Independent	Loyal	Reliable
Individualistic	Sensitive to the needs of others	Secretive
Makes decisions easily	Shy	Sincere
Masculine	Soft spoken	Solemn
Self-reliant	Sympathetic	Tactful
Self-sufficient	Tender	Theatrical
Strong personality	Understanding	Truthful
Willing to take a stand	Warm	Unpredictable
Willing to take risks	Yielding	Unsystematic

1.6.3 Stereotip perempuan berpolitik

Stereotip perempuan berpolitik menurut Schneider & Bos (2014) dalam jurnal *Measuring Stereotypes of Female Politicians* menunjukkan bahwa perempuan dalam kegiatan berpolitik tidak memiliki kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan sifat maskulinitas untuk mendukung kegiatan berpolitik (Schneider & Bos, 2014).

- Perempuan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang meliputi kecerdasan, kerja keras, dan pengetahuan karena perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang politik.
- Perempuan tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang meliputi aspek menginspirasi, kepemimpinan, dan penyelesaian persoalan.
- Perempuan juga tidak memiliki maskulinitas yang diperlukan dalam kegiatan politik yang meliputi sifat kompetitif, berani, dan agresif.

1.7 Asumsi Penelitian

Asumsi dari penelitian ini yaitu Film *Tilik the Series* dapat memberikan representasi mengenai perempuan berpolitik dengan memperlihatkan praktik kekuasaan perempuan di tengah maskulinitas politik di mana perempuan juga dapat bersaing dengan laki-laki dan memiliki kapabilitas untuk terlibat dalam kegiatan politik, melawan struktur sosial yang terbentuk oleh budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan, serta melawan stereotip yang menganggap perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin dan berada dalam lingkungan politik.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika John Fiske. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan eksploratif untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial (Creswell & Creswell, 2018). Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai bagaimana perempuan yang termarginalkan dalam bidang politik direpresentasikan dalam film *Tilik the Series* dengan penerapan praktik kekuasaan dan praktik ideologi maskulinitas politik dengan menggunakan analisis semiotika John Fiske untuk mendapatkan pemaknaan yang mendalam.

1.8.2 Korpus Penelitian

Korpus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan melakukan analisis semiotika dengan mengamati film dan menganalisis tiap-tiap

adegan dalam film *Tilik the Series*. Analisis semiotika dalam penelitian ini menggunakan teori semiotika John Fiske di mana analisis dilakukan melalui tiga level yaitu realitas, representasi, dan ideologi untuk memahami bagaimana representasi perempuan berpolitik dalam film *Tilik the Series*.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data penelitian ini yaitu kualitatif dengan data yang bersumber dari dokumentasi tiap unsur film *Tilik the Series*, serta menggunakan data yang bersumber dari tinjauan pustaka dikarenakan hasil dari penelitian ini berupa interpretasi atau pemaknaan mengenai representasi perempuan berpolitik, baik mengenai kekuasaan perempuan dalam politik maupun praktik ideologi maskulinitas politik dengan analisis semiotika John Fiske.

1.8.4 Sumber Data

Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari dialog tokoh, visualisasi, adegan, setting, dan bahasa verbal maupun nonverbal pada film *Tilik the Series*. Kemudian, data Sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari pustaka buku, jurnal, artikel, pemberitaan, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan teori dan informasi yang mendukung penelitian representasi perempuan berpolitik dan Film *Tilik the Series*.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, dan kajian pustaka untuk mengumpulkan data sehingga data yang dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis untuk mendeskripsikan representasi perempuan berpolitik dalam film *Tilik the Series*, baik mengenai praktik kekuasaan perempuan dalam politik maupun praktik

ideologi maskulinitas politik. Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti dengan mengambil gambar dan memotong gambar dalam Film *Tilik the Series*, dan teknik kajian pustaka dengan mengumpulkan dan memahami berbagai referensi, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika John Fiske untuk menjawab rumusan permasalahan dengan mendeskripsikan bagaimana film *Tilik the Series* merepresentasikan perempuan berpolitik dengan praktik kekuasaan perempuan atau dengan penerapan ideologi maskulinitas politik yang terbagi dalam tiga tahap:

- a. Tahap realitas yaitu proses penandaan realitas yang ada dalam adegan dengan kode-kode sosial yang berhubungan dengan lingkungan, pakaian, gerak tubuh, ekspresi, dan ucapan.
- b. Tahap kedua yaitu representasi yang mencakup kode teknis mengenai kamera, *editing*, pencahayaan, musik. Tahap representasi ini juga memperhatikan kode konvensional yang terdiri dari konflik, karakter, pengaturan, dan pemilihan pemain.
- c. Tahap ketiga yaitu ideologi merupakan hasil dari kedua tahap yang kemudian dikategorikan pada penerimaan dan hubungan sosial dengan kode ideologi, seperti ideologi patriarki, feminisme, dan kapitalisme.

1.8.7 Goodness Criteria

Penggunaan paradigma kritis dalam penelitian ini memerlukan analisis yang komprehensif dengan kriteria kualitas penelitian (*Goodness Criteria*) diperoleh dari

konteks *historical situatedness* di mana penelitian memperlihatkan sejauh mana situasi sosial, historis, budaya, ekonomi, serta politik dapat melatarbelakangi representasi perempuan berpolitik, baik dalam menampilkan kekuasaan perempuan dalam politik maupun ideologi maskulinitas politik.

1.9 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode semiotika di mana terdapat interpretasi yang berbeda pada setiap orang sesuai dengan latar belakang tiap individu masing-masing, membutuhkan banyak waktu untuk menganalisis tiap adegan dan episode dalam film *Tilik the Series*, tidak adanya publikasi naskah asli dari film *Tilik the Series*, serta kekurangan referensi karena minimnya penelitian yang membahas mengenai film *Tilik the Series*.